

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK TANI SEBAGAI
PENGUNA PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM
KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH :
SILVIA ALMA YANTI
1910012111123

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 531/Pdt/2/II-2023

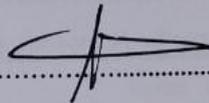
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg :531/Pdt/02/II-2023

Nama : Silvia Alma Yanti
Npm : 1910012111123
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Tani sebagai Pengguna Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing)

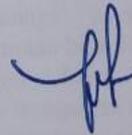


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK TANI SEBAGAI PENGGUNA PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK

Silvia Alma Yanti¹ Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : silviaalmayanti15@gmail.com

ABSTRAK

Subsidized fertilizer is fertilizer with the Highest Retail Price (HET) which is subsidized by the government for farmer groups. The aim of the research is to find out why farmers do not get subsidized fertilizer and to find out the legal protection provided by the government. The formulation of the problems in this research are, 1) What are the causes of Farmers not getting subsidized fertilizers in Nagari Kampung Batu Dalam 2) How is the legal protection given to farmers as users of subsidized fertilizers. This study uses a type of sociological approach. The results showed that the reason why farmers did not get subsidized fertilizer was because they were not members of farmer groups. The forms of protection given to farmers include agricultural insurance and farmer empowerment in the form of guidance from agricultural institutions

Keywords: *Consumer Protection, Government, Farmers, Fertilizers, Subsidies.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia tergolong negara agraris yang jumlah penduduknya amat banyak serta kebanyakan berprofesi sebagai petani. Dalam pertanian salah satu faktor keberhasilan hasil ialah pupuk.¹

Pupuk bersubsidi ialah pupuk yang disubsidi pemerintah untuk mencukupi keperluan yang dibutuhkan petani yang pelaksanaan pemberian subsidi berdasar pada program Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Pupuk subsidi hanya ada dua jenis sekarang yaitu Urea dan NPK. Penerimaan pupuk subsidi ini hanya akan diterima oleh petani yang tergabung kedalam kelompok tani.

Namun kecurangan yang ada menimbulkan kelangkaan yang semestinya diterima petani. Maka pemerintah perlu membuat suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi segala sesuatu yang memiliki

kaitan dengan pupuk. Guna mengawasi hal tersebut, pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang mempunyai tugas yakni mengawasi pupuk serta pestisida. Dalam memberikan bantuan berupa pupuk subsidi ke petani, maka terdapat prinsip 6T ialah Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu.

Dengan diberlakukannya prinsip tersebut maka harapannya pupuk yang disubsidi pemerintah bisa disalurkan dengan baik. Dengan adanya pupuk subsidi yang mulai mengalami kekurangan persediaan ini, membuat petani mengeluh, dan menurutnya pemerintah harus berupaya melakukan perbaikan terkait mekanisme subsidi pupuk dan juga mengawasi pada saat pupuk tersebut didistribusikan.²

Berdasar permasalahan diatas, menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM**

¹Berlian Fajar Latifa, 2016, *'Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus'*, *Law Rivew: Jurnal Diponegoro*, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 1.

² Nur Indah Mansyur, Eko Hary Pudjiwati, Aditya Murti Laksono, 2021, *'Pupuk dan Pemupukan'*, Cetakan ke-1, Syiah Kuala University Press, Aceh, hlm. 123.

TERHADAP KELOMPOK TANI SEBAGAI PENGGUNA PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab petani tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada Petani sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Guna mengetahui:

1. Penyebab petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitiann
Penelitian ini berjenis hukum empiris ataupun disebut sosiologis yang dilakukan dengan menyurvei maupun mengunjungi. Data dari penelitian ini bersumber pada hasil wawancara serta bahan hukum lainnya, yakni primer dan sekunder.³
2. Sumber Data
Terdapat dua sumber yakni:
 - a. Data primer ialah data yang didapat penulis langsung yang berasal dari sumber pertama.⁴
 - b. Data sekunder ialah data yang di peroleh penulis yang memiliki sumber dari kajian kepustakaan

³ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

atau kajian literatur ataupun bahan pustaka lainnya namun masih memiliki kaitan dengan permasalahan. Hal tersebut disebut bahan hukum.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Arti wawancara ialah upaya yang dilaksanakan supaya data yang dibutuhkan dapat terkumpul.⁶

b. Kuesioner ialah suatu alat pengumpulan data primer dengan metode survei, responden melalui pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab petani tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

Bersumber dari hasil penelitian, banyak petani yang tidak mendapatkan informasi maupun mengetahui terkait aturan serta prosedur terkait pupuk subsidi, bahkan ada sebagian petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani masih terkendala prosedur pengajuan guna memperoleh pupuk subsidi pada pihak yang berkaitan.⁷ Menurut Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Danau Kembar, mengenai pupuk bersubsidi ini prosedur mengadakan serta menyalurkan pupuk bersubsidi yang dilakukan pemerintah ditujukan ke Sektor Pertanian secara Nasional. Namun ada kendala yang terjadi dilapangan.⁸ Berdasar penjelasan sebab petani tidak memperoleh pupuk subsidi:

1. Petani yang tidak bergabung

⁵ Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

⁶Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 1.

⁷ Ilham, 2023, *Hasil Wawancara Lapangan Kepada Petani*, Kampung Batu Selatan, pada 7 Januari 2023, pukul 10.00 WIB

⁸ Rinaldi, 2023, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Danau Kembar, Kampung Batu Selatan, *Wawancara*, pada 5 Januari 2023, pukul 10.00 WIB.

- dikelompok tani.
2. Petani yang sudah bergabung dikelompok tani namun tidak mengerti prosedur serta langkah guna memperoleh pupuk subsidi.
 3. Kelompok tani tidak mampu melakukan penebusan pupuk subsidi pada pengecer sesuai dengan jumlah pupuk yang ada pada RDKK
- B. Masalah lainnya yang membuat petani tidak memperoleh pupuk subsidi, dikarenakan prosedur pengajuan yang telambat serta uang dari petani juga terlambat membuat waktu pemupukan menjadi tidak sinkron.

Perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Petani sebagai Penerima Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok

Sektor pertanian sekarang ini identik dengan ketidak pastiannya karena hasil pertaniannya tergantung pada musimnya.

Menurut Kepala Balai Penyuluhan Pertanian menyebutkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diberikan berupa pembinaan dari lembaga pertanian serta memberikan aturan terkait asuransi pertanian, diantaranya :

- 1) Pemerintah beserta Pemda sesuai wewenangnya sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan usaha tani yang dilaksanakan petani yang bentuknya ialah asuransi pertanian. perlindungan usaha tani yang
- 2) Asuransi Pertanian yang dimaksudkan ialah upaya memberikan perlindungan pada petani akibat gagal panen karena

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab petani tidak memperoleh pupuk subsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berdasar hasil penelitian, terdapat dua golongan petani yang bukan

penerima pupuk subsidi. Golongan pertama ialah petani yang tidak bergabung dikelompok tani. Golongan kedua ialah petani yang telah tergabung dikelompok tani tetapi dikarenakan beragam hal membuat petani itu tidak memperoleh pupuk subsidi.

2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada petani diantaranya asuransi pertanian dan juga diberikan binaan yang langsung dari Lembaga pertanian supaya petani melakukan usaha taninya secara maksimal sehingga hasil yang diperolehnya bisa maksimal.

B. Saran

1. Mengenai terdapatnya petani yang tidak memperoleh pupuk subsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok maka alangkah baiknya dibuatkan peraturan yang jelas berbentuk peraturan daerah dari pemerintah terkait standar operasional prosedur (SOP) guna memperoleh pupuk subsidi. Pemerintah diharapkan untuk lebih mengoptimalkan untuk memberikan penyuluhan serta pembinaan pada semua petani sehingga hal tersebut akan membuat petani yang belum tergabung bisa tergabung. Dengan hal tersebut, syarat yang perlu petani penuhi guna memperoleh hak mereka guna mendapatkan pupuk subsidi bisa terpenuhi. Kemudian, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dapat memberikan peningkatan partisipasi masyarakat untuk memberikan pengawasan tentang penyelenggaraan program pupuk subsidi di tingkat Distributor dan Pengecer. Hal tersebut dikarenakan Distributor sekaligus Pengecer ialah kunci utama berhasilnya pendistribusian pupuk subsidi supaya dapat ke tangan petani yang memiliki hak atas pupuk tersebut selaras dengan prosedur serta peraturan yang diberlakukan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok harus lebih responsif atas usaha hukum yang dilaksanakan

oleh petani bila timbul permasalahan terkait pendistribusian pupuk subsidi yang tidak selaras dengan peraturan yang diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan pupuk menjadi bahan yang amat petani perlukan serta perannya sangat vital guna berlangsungnya kegiatan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Nur Indah Mansyur, Eko Hary Pudjiwati, Aditya Murtiaksono, 2021, *'Pupuk dan Pemupukan'*, Cetakan ke-1, Syiah Kuala University Press, Aceh.

Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta.

Sumber Lain

Berlian Fajar Latifa, 2016, *'Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus'*, *Law Rivew: Jurnal Diponegoro*, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih untuk Bapak Suamperi, S.H., M.H., yang menjadi pembimbing penulis dan meluangkan waktunya serta memberikan arahan agar skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik serta penulis ucapkan pada pihak yang membantu supaya skripsi ini bisa selesai dengan baik.